

# **PENGARUH KEHARUSAN PENYEDIA MEMILIKI REKENING GIRO TERHADAP POTENSI PENINGKATAN TRANSAKSI KKP**

Adi Wibowo Ari Santoso\_1, Indra Timbul Tua Mangunsong\_2, Cyndi Louisa\_3  
KPPN Muara Bungo\_1, KPPN Muara Bungo\_2, KPPN Muara Bungo\_3

## **Abstract**

*The use of Digital Payment – Marketplace has a considerable influence on the economic activities of the institutions. With Digital payment, the cashless system is also expected to develop, especially the pandemic conditions that we have experienced. However, in the case of using a Government Credit Card (KKP), the provider itself needs to create a checking account as a condition of use. The provider is considered to be reluctant to use it because it has to create a checking account. This study aims to calculate the effect of requiring providers to have a checking account on the potential increase in Government Credit Card (KKP) transactions. The methodology used is to collect data and analyze data on potential vendor data and transaction data using Digital payment.*

## **Abstrak**

Penggunaan Digital Payment – Marketplace memberi pengaruh yang cukup besar terhadap aktivitas ekonomi satker. Dengan adanya Digipay, sistem cashless juga diharapkan dapat berkembang, terlebih kondisi pandemi yang sudah kita rasakan. Namun, dalam hal penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, penyedia sendiri perlu membuat rekening giro sebagai persyaratan penggunaan. Penyedia dianggap menjadi enggan menggunakan dikarenakan harus membuat rekening giro tersebut. Penelitian ini ditujukan untuk menghitung pengaruh diwajibkannya penyedia untuk memiliki rekening giro terhadap potensi peningkatan transaksi KKP. Metodologi yang digunakan ialah melakukan pengumpulan data dan analisis data terhadap data vendor potensial dan data transaksi penggunaan Digipay.

**Keywords:** Cashless, Digipay, KKP, Penyedia, Rekening Giro, Transaksi

**JEL Classification:** Microeconomics, Economic Systems, Public Economics

## **PENDAHULUAN**

Minimnya implementasi digipay ataupun penggunaan KKP di KPPN Muara Bungo cukup rendah.

Transaksi-transaksi yang dilakukan dengan GUP seharusnya dapat menggunakan Digipay. Transaksi GUP biasanya menggunakan cash.

SOP atau proses bisnis juga kurang familiar sehingga masih banyak penyedia/vendor yang belum menggunakan KKP.

Pengaruh dari hal-hal tersebut menjadikan penulis untuk mencari solusi akan implementasi penggunaan KKP yang rendah.

Tingkat Implementasi digipay menjadi indikator kinerja utama yang kini dimiliki oleh KPPN, Digipay menjadi salah satu fokus utama Kementerian Keuangan dan harapan agar Digipay dapat memberi pengaruh terhadap aktivitas ekonomi dalam penerapan APBN yang dapat menunjang akuntabilitas APBN dengan peningkatan digital treasury di KPPN.

## **TINJAUAN LITERATUR**

Berdasarkan PER 20/PB/2019 tentang Uji Coba Penggunaan Uang Persediaan Melalui Sistem Marketplace dan Digital Payment Pada Satuan Kerja, Digital Payment adalah pembayaran dengan mekanisme overbooking/ pemindahbukuan dari Rekening Pengeluaran secara elektronik dengan kartu Debit/ *Cash Management System* (CMS) atau Kartu Kredit Pemerintah (KKP) ke Rekening Penyedia Barang/Jasa, dalam rangka penggunaan uang persediaan melalui system marketplace.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metodologi yang digunakan dalam penelitian kali ini ialah observasi dan analisis data.

Teknik pengumpulan data yang diambil ialah dengan mengambil data digipay.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan data akumulatif yang akan merupakan tentang data transaksi penggunaan Digital Payment oleh para satker, pendekatan yang kami lakukan yaitu mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan dalam bentuk naratif serta melakukan pengukuran akurat terhadap data tersebut. Pembahasan akan mengacu terhadap jumlah pagu yang digunakan dengan transaksi yang ada.

[illegible]

nama satker	type pembayaran	nama distributor
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MUJARA BUNGO	KKP	CV. Ammar Abadi
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MUJARA BUNGO	KKP	CV. Ammar Abadi
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MUJARA BUNGO	KKP	CV. Ammar Abadi
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MUJARA BUNGO	KKP	Dwi Fama
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MUJARA BUNGO	KKP	CV. Ammar Abadi
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MUJARA BUNGO	KKP	ASTON GRAPHINDO INDONESIA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MUJARA BUNGO	KKP	ASTON GRAPHINDO INDONESIA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MUJARA BUNGO	KKP	CV. Ammar Abadi
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MUJARA BUNGO	KKP	CV. Ammar Abadi
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MUJARA BUNGO	KKP	CV. Ammar Abadi
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MUJARA BUNGO	KKP	Supriyanto Interior
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MUJARA BUNGO	KKP	Supriyanto Interior

Jumlah transaksi yang dilakukan oleh KPP Muara Bungo lebih sedikit dibanding dengan KPPN Muara Bungo.

nama unit	type pelayanan	category name	nama distributor	BANK
KANTOR PELAYANAN PERBEDIHAARAAN NEGARA MUARA BUNGO	UA DEBIT	Barang ATK, Peralatan dan Mesin	CX. Ammar Abadi	BBRI
KANTOR PELAYANAN PALM PRATAMA MUARA BUNGO	UA DEBIT	Barang ATK, Peralatan dan Mesin	CX. Ammar Abadi	BBRI
KANTOR PELAYANAN PERBEDIHAARAAN NEGARA MUARA BUNGO	UA DEBIT	Jasa Caring	Umah Kopri Muara Bungo	BBRI
KANTOR PELAYANAN PERBEDIHAARAAN NEGARA MUARA BUNGO	UA DEBIT	Barang Kosumsi	Dwi Fermo	BBRI
KANTOR PELAYANAN PERBEDIHAARAAN NEGARA MUARA BUNGO	UA DEBIT	Barang Kosumsi	Dwi Fermo	BBRI
KANTOR PELAYANAN PERBEDIHAARAAN NEGARA MUARA BUNGO	UA DEBIT	Barang ATK, Peralatan dan Mesin	CX. Ammar Abadi	BBRI
KANTOR PELAYANAN PERBEDIHAARAAN NEGARA MUARA BUNGO	UA DEBIT	Barang ATK, Peralatan dan Mesin	CY ARIAN SITA PERDANA	BBRI
KANTOR PELAYANAN PERBEDIHAARAAN NEGARA MUARA BUNGO	UA DEBIT	Barang ATK, Peralatan dan Mesin	ASTON GRAPHINDO INDONESIA	BBRI
KANTOR PELAYANAN PERBEDIHAARAAN NEGARA MUARA BUNGO	UA DEBIT	Barang ATK, Peralatan dan Mesin	ASTON GRAPHINDO INDONESIA	BBRI
KANTOR PELAYANAN PERBEDIHAARAAN NEGARA MUARA BUNGO	UA DEBIT	Barang ATK, Peralatan dan Mesin	CX. Ammar Abadi	BBRI
KANTOR PELAYANAN PERBEDIHAARAAN NEGARA MUARA BUNGO	UA DEBIT	Barang ATK, Peralatan dan Mesin	Dwi Fermo	BBRI
KANTOR PELAYANAN PERBEDIHAARAAN NEGARA MUARA BUNGO	UA DEBIT	Barang Kosumsi	Dwi Fermo	BBRI
KANTOR PELAYANAN PALM PRATAMA MUARA BUNGO	UA DEBIT	Barang ATK, Peralatan dan Mesin	Dwi Fermo	BBRI
KANTOR PELAYANAN PERBEDIHAARAAN NEGARA MUARA BUNGO	UA DEBIT	Barang ATK, Peralatan dan Mesin	CX. Ammar Abadi	BBRI
KANTOR PELAYANAN PERBEDIHAARAAN NEGARA MUARA BUNGO	UA DEBIT	Barang ATK, Peralatan dan Mesin	Dwi Fermo	BBRI
KANTOR PELAYANAN PERBEDIHAARAAN NEGARA MUARA BUNGO	UA DEBIT	Barang ATK, Peralatan dan Mesin	ASTON GRAPHINDO INDONESIA	BBRI
KANTOR PELAYANAN PALM PRATAMA MUARA BUNGO	UA DEBIT	Barang ATK, Peralatan dan Mesin	Dwi Fermo	BBRI

Penulis berasumsi apabila syarat harus memiliki rekening giro dihapuskan maka tingkat keinginan penyedia untuk memiliki atau bertransaksi melalui Kartu Kredit Pemerintah semakin meningkat.

Terdapat hanya beberapa satker yang sudah menggunakan KKP – Digipay pada lingkup Provinsi Jambi.

## **IMPLIKASI DAN KETERBATASAN**

Dikarenakan kondisi pandemi yang ada, peneliti tidak dapat melakukan observasi secara langsung kepada penyedia di lapangan, sehingga sulitnya penulis dalam menjelaskan penelitian yang sudah dilakukan. Saran yang dapat diberikan untuk penyempurnaan pengisian ruang penelitian terkait Digipay ialah pemenuhan data lebih baik lagi yang menunjang nampaknya signifikan pengaruh Rekening Giro terhadap kesediaan penyedia menggunakan KKP.